

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes pada Desa Geliting Tahun Anggaran 2019-2022, dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat kesimpulan :

1. Penyebab terjadinya SiLPA Desa Geliting dapat dilihat melalui beberapa tahap pengelolaan keuangan desa yaitu :
 - a. Pada tahap perencanaan dan penganggaran masih terdapat masalah karena proses pengerjaannya tidak sesuai dengan agenda kerja yang sudah disepakati bersama. Adapun penyebab yang terjadi dalam tahapan ini yaitu karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal dikarenakan mayoritas latar belakang pendidikan adalah SLTA/ Sederajat, akibatnya Perangkat Desa Geliting mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Kinerja Aparat Desa dalam menyusun APBDes kurang baik sehingga kedepannya Pemerintah Desa Geliting perlu menjadwalkan agenda rapat untuk menyusun dan menetapkan APBDes tepat waktu dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga kerja tidak saling menunggu atau memberikan satu orang sendiri yang mengerjakan semua administrasi.
 - b. Tahap pelaksanaan pada Desa Geliting yaitu masih terdapat program/kegiatan yang tidak dilaksanakan dan direalisasikan sesuai

dengan yang sudah di rencanakan karena dana tahap selanjutnya tidak dicairkan. Dalam hal ini dana tahap III seharusnya dicairkan pada bulan Oktober tetapi di bulan Desember baru dicairkan. Seperti yang diketahui bahwa pada akhir tahun sudah memasuki musim hujan akibatnya ada program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan dananya di SiLPA kan.

c. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa Geliting yaitu belum menyusun dan melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ). Surat pertanggungjawaban (SPJ) merupakan surat yang berisi laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. SPJ tersebut memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi belanja dan siapa yang melaksanakan. Oleh karena itu SPJ sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena SPJ merupakan bukti dalam melakukan pengeluaran uang. Keterlambatan pemerintah desa membuat SPJ menjadi penyebab pencairan dana desa tahap III terlambat masuk ke rekening kas desa sehingga program/kegiatan tahun berkenan tidak bisa dijalankan dan harus ditunda tahun berikutnya.

2. Dampak SiLPA bagi pembangunan desa adalah pembangunan menjadi tertunda akibatnya masyarakat merasa rugi karena tidak terlaksananya pembangunan-pembangunan desa seperti pada operasional posyandu, pembangunan drainase, pembuatan peta desa, kunjungan rumah bayi balita, kunjungan rumah ibu hamil, pembersihan lokasi pasar, penataan

lapangan, pengadaan pilar desa, serta pengadaan operasional paud dan TKK. Selain itu dampak SiLPA bagi Pemerintah Desa adalah pemerintah desa belum optimal dalam mengelola dana desa. Hal ini terjadi karena Pemerintah Desa terlambat menyampaikan laporan realisasi dan pengajuan dana untuk tahap selanjutnya. Semakin besar jumlah SiLPA pada suatu Pemerintah Desa menunjukkan semakin besar dana yang tersimpan di kas desa yang belum atau tidak digunakan dalam belanja desa. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Geliting masih terdapat dana yang belum digunakan sehingga masih terdapat sisa dana atau dana tersebut tidak terserap dengan baik.

3. Upaya atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Geliting yaitu dengan melakukan pelatihan kepada kepada perangkat desa seperti bimtek pengelolaan keuangan desa, pelatihan bagi bendahara dan sekretaris mengenai SPJ dana desa, agar dapat meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa agar sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga tidak mengalami keterlambatan saat menyusun laporan pertanggungjawaban agar dana yang dicairkan juga tidak terlambat. Selain itu pemerintah desa juga harus mengalokasikan dana cadangan atau dana tambahan dengan cara membuat dana cadangan yang dikhususkan untuk mengantisipasi jika diperlukan dana yang mendesak untuk membiayai program pemerintahan, sehingga tidak menghentikan program dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.

6.2 Saran

Penulis Memberi saran kepada beberapa pihak dalam mengatasi terjadinya SiLPA di Desa Geliting :

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan kepada perangkat desa pada pemerintah desa yang ada di Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka, agar dapat meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, agar laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga tidak mengalami keterlambatan saat penyusunan pelaporan, karena apabila penyusunan rencana pelaporannya terlambat maka dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan dana desa dan bantuan keuangan lain dari Pemerintah Kabupaten yang dapat menyebabkan adanya program/kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaannya.
2. Bagi Pemerintah Desa Geliting untuk terus meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan dan administrasi desa secara berkala. Harus dibuatkan skejul atau jadwal secara teratur agar proses penyusunan perencanaan kegiatan penetapan APBDes, pelaksanaan APBDes dan pelaporan APBDes tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pengerjaan program fisik maka perlu ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia material baik lokal maupun non lokal. Perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.